

BAB V

KESIMPULAN

Sejak Perang Dunia Pertama dari segi modalitas militer Jepang mampu menjajarkan kekuatan kemiliterannya setara dengan kekuatan-kekuatan utama dunia yakni Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis serta Italia. Hal tersebut menjadikan Jepang sebagai kekuatan militer terkuat pada segi kemiliteran untuk ukuran Asia. Terbukti bahwa kekuasaan Jepang pada kekuatan militernya menjadikan Jepang sebagai kolonial terbesar di Asia yang berhasil menguasai Asia timur dan Asia Tenggara, berhasil memukul mundur tentara Inggris dan Belanda dari Asia, sehingga dapat menguasai Tiongkok, Korea, dan merebut kepulauan Kuril, Manchuria, Skhalin dari Rusia. Dari hal itulah menjadikan Jepang sebagai “*pasific power*”.

Setelah Perang Dunia Kedua Jepang mengalami kehancuran dan penderitaan fisik maupun psikologis akibat kekalahan dalam berakhirnya Perang Pasifik pada bulan Agustus 1945, dan membuat Jepang menyerah pada pihak Sekutu Khususnya AS. Kehancuran yang dialami Jepang tidak hanya kehancuran negara melainkan juga mengena ke dalam masyarakat Jepang yang sangat taat pada Kaisarnya. Jepang tidak hanya membangun kembali infrastruktur negaranya melainkan juga membangun psikologis dari masyarakat.

Pada tahun 1960-an Jepang dapat dikatakan mendapatkan kekuatannya kembali sebagai negara industri maju mengimbangi kemampuan Negara-negara maju lainnya, khususnya Negara-negara yang menjadi kekuatan utama dunia.

Negara yang sudah memiliki investasi intelektual dan tingkat ilmu pengetahuan yang sangat tinggi dengan cepat dapat membangun kembali negaranya bahkan dapat menjadi *super power* di bidang ekonomi.

Kebangkitan Jepang akan kekuatan kemiliterannya juga dibuktikan menjelang akhir abad XX, yang mana Jepang terlihat lebih berani berpartisipasi menunjukkan eksistensi serta kekuatan angkatan militernya *Japan Self Defense Force* (JSDF) dengan mengirimkan JSDF dalam rangka *Peace Keeping Operation* ke berbagai negara di dunia, serta menaikkan anggaran pertahanan yang cukup signifikan disetiap tahunnya. Perubahan kebijakan Jepang untuk membangkitkan kembali perangkat serta kekuatan militernya bukan hanya sekedar merupakan fenomena perubahan kebijakan suatu negara, penulis berpendapat bahwa Jepang mulai melakukan pergeseran gaya kebijakan berpolitik sebagai menunjukkan dinamika dan perkembangan hubungan antara Jepang dengan hal-hal yang mempengaruhi negara tersebut untuk kembali menggunakan kekuatan militernya.

Adapun yang mendasari Jepang dalam perubahan kebijakan meningkatkan kapabilitas sistem pertahanannya, sesuai pada analisis kerangka dasar teori yang dikemukakan oleh penulis, bahwa kebijakan yang dilakukan Jepang merupakan sebuah kebijakan dalam negeri yang ditujukan sebagai alat penyusun politik luar negeri, berdasarkan pada konsep teori pengambilan keputusan luar negeri William D. Coplin yang mengungkapkan mengenai militer dan pertahanan sebagai bentuk bagaimana Jepang mengupayakan tujuan politik luar negeri dengan membangkitkan kembali sistem pertahanan yang dipengaruhi oleh faktor internal

maupun eksternal yakni pada faktor pengambil keputusan, militer dan ekonomi, serta konteks internasional. Teori tersebut didukung oleh konsep *security dilemma* yang mengemukakan bahwa negara yang hidup di dalam sebuah sistem yang anarki harus memperhatikan masalah keamanannya, baik dari serangan ataupun dominasi negara lain. Oleh karena itu, negara tersebut akan berusaha meningkatkan kekuatannya agar bisa terhindar dari ancaman kekuatan negara lain. Ketiga faktor tersebut menunjukkan *security dilemma* yang saat ini sedang dihadapi oleh Jepang.

Faktor pengambil keputusan yaitu sosok *policy influence* Perdana Menteri Shinzo Abe, di mana ia merupakan ujung tombak kebangkitan pertahanan Jepang, memulai perubahan fundamental dalam orientasi kebijakan pertahanan Jepang, dari mulai merubah status Badan Pertahanan menjadi Dewan Keamanan pada Januari 2006. Serta reaksi Shinzo Abe terhadap permasalahan keamanan khususnya terhadap perkembangan militer Tiongkok dan Korea Utara yang semakin aktif, hal ini dapat dilihat dari *National Defense Program Guidelines*, serta *Japan White Paper* yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jepang.

Faktor ekonomi dan militer merupakan kebutuhan Jepang dalam menunjang sektor ekonominya untuk era ini sudah membutuhkan dukungan keamanan yang mumpuni. Karena mayoritas sektor perekonomian Jepang merupakan perekonomian internasional yang berinteraksi dan membutuhkan sumber daya alam ataupun energy dari negara lain dalam menjalankan perkonomiannya, dimana terdapat persaingan antar negara untuk menjaga agar sektor ekonomi ini tetap berjalan seperti keamanan energy dan keamanan

perjalanan ekspor maupun impor, keamanan geografis, perebutan sumber daya alam, dan sebagainya dimana Jepang membutuhkan pertahanan dan keamanan untuk menjaga hal tersebut tetap pada kendali Jepang.

Faktor yang terakhir adalah faktor konteks internasional yaitu dimana Jepang mulai mendapatkan tekanan dan ancaman kemanan dari negara-negara tatangga terutama negara kawasan khususnya Tiongkok dan Korea Utara. Ancaman tersebut dirasa merupakan ancaman yang nyata untuk kedaulatan Jepang mulai dari persengetaan wilayah di Laut Cina Selatan, persaingan teknologi militer yang diikuti persaingan hegemoni khususnya di Asia Timur, serta ancaman misil dan rudal serta pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Selain itu keinginan serta adanya dukungan dari negara adi daya AS untuk mewujudkan Jepang menjadi negara normal yang mempunyai kemandirian pertahanan dan keamanan negaranya.